

PENGARUH SAP AKRUAL, PENGUKURAN KINERJA, PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Saiful Haris

saifulharis222@gmail.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the effect of the implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards, performance measurement, and internal control systems on Local Government Financial Management Accountability at the East Java Provincial Water Resources Public Works Office. The research was quantitative. The population was employees who had authority in financial planning and management at the East Java Provincial Water Resources Public Works Office. Moreover, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on the criteria given. In line with that, there were 30 respondents as the sample. The instrument in the data collection technique was a questionnaire. Furthermore, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 20. The result showed that the implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards, performance measurement, and internal control systems had a positive effect on Local Government Financial Management Accountability. This condition was shown by a significant level from each variable for about below $\alpha = 5\%$.

Keywords: implementation of accrual-based government accounting standards, performance measurement, internal control systems, local government financial management accountability

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua, Pengukuran Kinerja dan Sistem Pengendalian Internal, terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan di Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dengan sampel yang digunakan sebanyak 30 responden. Proses pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis Regresi linear Berganda dengan bantuan program SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua, Pengukuran Kinerja dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Kondisi ini ditunjukkan dengan adanya tingkat signifikansi masing-masing variable tersebut dibawah $\alpha = 5\%$.

Kata Kunci: penerapan sap akrual, pengukuran kinerja, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

PENDAHULUAN

Isu akuntabilitas terkait pengelolaan keuangan di Indonesia semakin menjadi fokus perhatian akhir-akhir ini. Hal ini dipicu oleh desentralisasi fiskal yang dialami oleh pemerintah, di mana tanggung jawab keuangan dipindahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai dampak dari pelaksanaan otonomi daerah. Perubahan ini berdampak signifikan pada alokasi anggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah diimplementasikan dengan tujuan umum meningkatkan

kemandirian daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik terkait pengelolaan keuangan daerah, merespons kebutuhan masyarakat secara lebih baik, mendorong partisipasi publik dalam pembangunan daerah, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan keuangan yang demokratis di tingkat daerah (Mardiasmo, 2009). Di era digital, akuntabilitas memainkan peran yang sangat penting dengan tujuan-tujuan khusus, terutama dalam konteks pemerintahan, bisnis, dan pengelolaan data. Akuntabilitas memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam pemerintahan, dan fungsi-fungsi ini membantu memastikan bahwa pemerintah bertindak dalam kepentingan masyarakat dan menjalankan tugasnya dengan baik. Mardiasmo (2002:20) Akuntabilitas publik yaitu kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sejak tahun 2015 seluruh instansi pemerintahan di Indonesia sudah diwajibkan untuk menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010. Sebelum diterbitkan SAP Akrua, SAP yang digunakan pada masa transisi adalah SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, yang menggunakan basis akuntansi kas dan akrual. Strategi yang digunakan untuk mengembangkan akuntansi pemerintahan adalah basis kas menuju basis akrual penuh (*cash basis toward accrual*). Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. SAP berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 mulai diberlakukan untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD Tahun Anggaran 2005. Sejak Oktober tahun 2010, telah ditetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP Akrua, sebagai pengganti SAP berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005. Dengan diterbitkannya SAP Akrua diharapkan dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih informatif, terutama terkait hubungannya dengan pengukuran kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan dalam periode akuntansi terkait. Serta dapat memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah untuk tujuan pengambilan keputusan.

Pengukuran kinerja menggunakan *value for money* dalam pengelolaan organisasi sektor publik ditekankan pada tiga pilar utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo 2009). Anggadini (2012) menegaskan pentingnya penerapan *value for money* dalam aktivitas pelayanan publik. Bagi pemerintah daerah, setiap uang yang diterima dan digunakan harus dipertimbangkan dengan cermat. Ekonomi menekankan pentingnya memilih dan menggunakan sumber daya dengan kualitas tertentu dengan biaya seminimal mungkin. Efisiensi berfokus pada penggunaan dana publik untuk menghasilkan hasil yang optimal. Sedangkan efektivitas menggarisbawahi pencapaian tujuan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. BPK RI menemukan adanya pemborosan anggaran negara Rp 25,85 T pada tahun 2022. Persepsi tentang besarnya alokasi anggaran yang tampak berlebihan menunjukkan pentingnya penerapan *value for money*, terutama dalam proses perencanaan anggaran dengan prioritas pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian internal adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai dalam unit kerja yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan/atau urusan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian internal pemerintah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan urusan pemerintah. Ini adalah instrumen yang penting untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik dan transparan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, Pengukuran Kinerja dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah pada Dinas PU dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

TINJAUAN TEORITIS

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Mardiasmo (2002:20) Akuntabilitas publik yaitu kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. donaldson dan davis (1991) pemerintah atau organisasi seharusnya bertindak sebagai "stewards" atau pengelola yang bertanggung jawab terhadap sumber daya publik dan kepentingan masyarakat Dalam melakukan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*), yaitu pelaporan kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2009).

Standar Akuntansi pemerintah Berbasis Akrual menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Basis akuntansi akrual merupakan metode di mana peristiwa atau transaksi ekonomi diperhitungkan, dilaporkan, dan ditampilkan dalam laporan keuangan pada saat peristiwa tersebut berlangsung, tanpa mempertimbangkan kapan penerimaan atau pembayaran kas atau instrumen serupa dilakukan.

Laporan Keuangan entitas Pelaporan menurut Standar Akuntansi Pemerintah ada tujuh, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih , Neraca , Laporan operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan laporan keuangan entitas akuntansi ada lima yaitu meliputi, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan

Tabel 1
Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah	Keterangan
PSAP No 01	Tentang Penyajian Laporan Keuangan
PSAP No 02	Tentang Laporan Realisasi Anggaran
PSAP No 03	Tentang Laporan Arus Kas
PSAP No 04	Tentang Catatan atas Laporan Keuangan
PSAP No 05	Tentang Akuntansi Persediaan
PSAP No 06	Tentang Akuntansi Investasi
PSAP No 07	Tentang Akuntansi Aset Tetap
PSAP No 08	Tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
PSAP No 09	Tentang Akuntansi Kewajiban
PSAP No 10	Tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

PSAP No 11	Tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
PSAP No 12	Tentang Laporan Operasional

Sumber: Peraturan Pemerintah no 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah

Tujuan perumusan Kerangka konseptual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah Sebagai acuan para penyusun standar dalam mengembangkan dan me-review Standar Akuntansi Pemerintahan, Sebagai acuan para penyusun laporan keuangan jika belum terdapat Standar Akuntansi Pemerintahan, Sebagai acuan para pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, sebagai acuan pemakai laporan keuangan pemerintah, Perkembangan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP.

Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja menggunakan *value for money* dalam pengelolaan organisasi sektor publik ditekankan pada tiga pilar utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo 2002). Ekonomi adalah praktik dalam membeli barang dan jasa dengan kualitas tertentu dengan harga yang terjangkau. Efisiensi membahas perbandingan antara sumber daya atau investasi yang diberikan (input) dengan hasil yang diperoleh (output). Efektivitas merujuk pada kemampuan sebuah organisasi atau program untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan cara yang paling efisien dan optimal, sejalan dengan alokasi sumber daya yang telah diberikan. Efektivitas dan efisiensi seringkali saling terkait. Organisasi yang efisien dalam penggunaan sumber daya mereka lebih cenderung mencapai efektivitas yang lebih tinggi karena mereka dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya yang rendah. Dalam konteks *value for money*, baik efisiensi maupun efektivitas harus dievaluasi bersama-sama untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan benar dan menghasilkan hasil yang optimal.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal merujuk pada proses yang terintegrasi dalam suatu organisasi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan sesuai dengan standar kebijakan yang ada. Apabila dijalankan dengan optimal, pengendalian ini akan meningkatkan produktivitas karyawan serta meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal mencakup lima unsur kunci yang saling berkaitan dan penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan instansi pemerintah, yang terdiri atas Lingkungan Pengendalian, Evaluasi Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pengawasan

Lingkungan Pengendalian, mencakup aspek fundamental seperti integritas dan etika, kompetensi, kualitas kepemimpinan, struktur organisasi yang jelas, serta kebijakan pengembangan SDM dan pengawasan internal yang efektif. Lingkungan ini juga melibatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain. Evaluasi Risiko, melibatkan penetapan visi dan misi yang jelas, serta identifikasi dan analisis risiko baik dari sumber internal maupun eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi. Aktivitas Pengendalian, termasuk tindakan dan prosedur yang dilaksanakan manajemen untuk mencapai tujuan, seperti evaluasi kinerja, pengembangan SDM, pengawasan sistem informasi, perlindungan aset, serta pencatatan dan dokumentasi transaksi. Informasi dan Komunikasi, menekankan pentingnya informasi yang relevan dan dapat diandalkan serta penggunaan saluran komunikasi yang efektif untuk memastikan informasi yang tepat waktu dan akurat. Pengawasan, melibatkan pengawasan rutin, perbandingan, rekonsiliasi, dan evaluasi independen oleh unit pengawasan internal atau pihak ketiga untuk memastikan sistem pengendalian internal berfungsi dengan baik. Keseluruhan unsur ini bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya di instansi pemerintah.

Hubungan Antar Variabel

Pengaruh SAP Akrual Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa laporan keuangan dari pemerintah pusat dan daerah mencerminkan dengan akurat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini mencakup realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan-catatan yang mendukung, dan bertujuan untuk mengurangi potensi penyimpangan serta menyediakan informasi yang relevan dan mudah dimengerti. Mengingat pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual, seperti Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, diharapkan akan berpengaruh positif. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Daerah. Era digital membawa perubahan signifikan dalam cara informasi dikelola dan disebar, sehingga penting bagi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi ini untuk memastikan transparansi, integritas, dan keakuratan dalam pelaporan keuangan.. Berdasarkan uraian hipotesis 1 yang dapat dirumuskan adalah

H_1 : Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengaruh Pengukuran kinerja terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengukuran Kinerja *value for money* merupakan sebuah standar dalam mengukur efektivitas pengeluaran anggaran dalam suatu organisasi, baik itu organisasi yang bertujuan mencari keuntungan (sektor swasta) maupun organisasi non-profit seperti sektor publik (pemerintah). *value for money* melibatkan penilaian kinerja yang mencakup tiga aspek kunci: efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Pada dasarnya, hal ini berarti bahwa indikator kinerja dalam perusahaan yang menerapkan *value for money* harus mencerminkan tingkat pencapaian tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya secara efisien, memberikan pelayanan yang optimal dengan biaya yang ekonomis. Penerapan pengelolaan anggaran yang berdasarkan prinsip *value for Money* merupakan langkah yang esensial bagi organisasi sektor publik. Dengan demikian, organisasi tersebut beroperasi sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu melayani kepentingan masyarakat, sebagaimana yang dinyatakan dalam teori Stewardship.

H_2 : Pengukuran kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rita Martini, Naufal Lianto, Sukmini Hartati, Zulkifli, Endah Widyastuti (2019), Yani Ahmad (2020) ditemukan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin efektif sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh suatu instansi pemerintah, maka akan semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sistem pengendalian internal yang baik dapat menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, serta memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah. Dengan demikian, penggunaan sistem pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan harapan yang ada.

H_3 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam konteks penelitian ini, populasi yang digunakan adalah para pegawai yang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan di Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yang merupakan proses pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Sampel yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari dua subbagian, yaitu subbagian keuangan dan subbagian penyusunan program dan bidang pengelola keuangan. Penelitian mengumpulkan data dari sekitar 30 orang sebagai sampel.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Variabel Dependen dalam Penelitian ini yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Mardiasmo (2002:20) Akuntabilitas publik yaitu kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas pengelolaan daerah merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan dan aset daerah.

Variabel Independen

Variabel Independen dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu 1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, 2) Pengukuran Kinerja, 3) Sistem Pengendalian Internal. Basis akuntansi akrua merupakan metode di mana peristiwa atau transaksi ekonomi diperhitungkan, dilaporkan, dan ditampilkan dalam laporan keuangan pada saat peristiwa tersebut berlangsung, tanpa mempertimbangkan kapan penerimaan atau pembayaran kas atau instrumen serupa dilakukan. Pengukuran kinerja menggunakan *value for money* dalam pengelolaan organisasi sektor publik ditekankan pada tiga pilar utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, (Mardiasmo, 2009). Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian internal adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai dalam unit kerja yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan/atau urusan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uji Instrumen

Uji instrumen penelitian ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Tujuan dari uji validitas data adalah untuk menilai apakah variabel atau pertanyaan yang digunakan mampu mengukur informasi yang seharusnya direpresentasikan atau validitas yang berkaitan dengan sejauh mana suatu pertanyaan atau variabel dapat mengukur aspek yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan dengan mengevaluasi setiap item pertanyaan dalam kuesioner, yaitu dengan menghitung koefisien korelasi antara masing-masing pertanyaan dan skor total yang diperoleh, kemudian membandingkannya dengan nilai kritis dari produk moment valid (Ghozali, 2007:135). Uji reliabilitas bertujuan untuk mengevaluasi keandalan suatu kuesioner yang digunakan sebagai indikator variabel atau konstruk tertentu. Keandalan kuesioner terlihat dari tingkat konsistensi atau stabilitas jawaban yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode "one-shot" atau pengukuran satu kali. Untuk menilai reliabilitas, digunakan pengukuran *Cronbach alpha*. Suatu variabel atau konstruk dianggap reliabel jika

nilai *Cronbach alpha* dari setiap variabel melebihi 0,60 atau 60%, menunjukkan keandalan penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diperlukan untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan sesuai dengan asumsi dasar model statistik yang digunakan. Jika suatu model tidak memenuhi asumsi-asumsi tersebut, hasil pengujian statistiknya dapat menjadi tidak valid, dan interpretasi hasilnya menjadi meragukan. Oleh karena itu, uji asumsi klasik menjadi langkah penting dalam analisis statistik untuk memastikan keandalan dan validitas hasil. Dalam uji asumsi klasik penelitian ini terdiri dari uji normalitas, heterokedastisitas dan multikolinearitas.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui pendekatan grafik. Ghazali (2007:112), normalitas pada dasarnya dapat teridentifikasi dengan melihat sebaran data dalam grafik, khususnya sebaran data pada sumbu diagonal. Kriteria pengambilan keputusan apabila data tersebar secara homogen sekitar garis diagonal dan mengikuti pola garis diagonal, ini mengindikasikan distribusi data yang mendekati normal. Dalam konteks ini, model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya jika data tersebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti pola garis diagonal, ini menunjukkan bahwa data tidak mengikuti distribusi normal. Dalam situasi ini, model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengevaluasi apakah dalam model regresi terdapat ketidakmerataan dalam varian dari residual antar observasi (Ghozali, 2007:69). Ketidakmerataan ini dapat terjadi jika varian residual tidak tetap atau homoskedastisitas. Sebaliknya, jika varian residual berbeda, maka hal ini disebut sebagai heteroskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan memeriksa pola dalam grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED, di mana sumbu Y merupakan nilai Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (selisih antara Y prediksi dan Y sebenarnya) yang telah *studentized*. Dasar analisisnya adalah jika terdapat pola tertentu dalam grafik, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, melebar, atau menyempit), maka ini mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya hubungan atau korelasi diantara variabel bebas. Model regresi yang baik adalah regresi yang variabel bebasnya tidak memiliki hubungan yang erat atau dengan kata lain tidak terjadi multikolinieritas antara variabel independennya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi dapat dilihat dari besarnya VIF (*Varian Inflation Factor*) dan *Tolerance* yaitu pedoman suatu model regresi yang bebas multikol adalah jika mempunyai besaran nilai VIF disekitar angka 1 dan mempunyai nilai *tolerance* mendekati. Kemudian besaran korelasi antara variabel independen yaitu pedoman suatu model regresi yang bebas multikol adalah koefisien antar variabel independen haruslah lemah, jika variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,09) maka hal itu merupakan indikasi adanya multikolinieritas

Teknik Analisis Data

Analisis regresi yang dilakukan untuk pengujian hipotesis adalah analisis regresi berganda Analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen. Analisis Regresi ini digunakan untuk mengetahui pengaruh tiga variabel independen yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Pengukuran

kinerja dan Sistem Pengendalian Internal. Berdasarkan variabel Independen dan dependen tersebut maka persamaan bentuk regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$AP = \alpha + \beta_1.SA + \beta_2.PK + \beta_3.PI + e$$

Keterangan:

AP : Akuntabilitas pengelolaan keuangan

α : Konstanta

$\beta_1\beta_2\beta_3$: Koefisien regresi

SA : Penerapan SAP Akrua

PK : Pengukuran Kinerja

PI : Pengendalian Internal

e : Error

Pengujian Model

Pengujian model dalam penelitian ini terdiri atas 1) Uji Koefisien Determinasi (R), 2) Uji Kelayakan Model (Uji F). Uji Koefisien determinasi (R) ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen Dengan pengukuran koefisien determinasi ini akan dapat diketahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar model Koefisien determinasi (R) dinyatakan dalam persentase. Nilai koefisien korelasi (R) ini berkisar antara $0 < R < 1$. Semakin besar nilai yang dimiliki, menunjukkan bahwa semakin banyak informasi yang mampu diberikan oleh variabel-variabel independen untuk memprediksi variansi variabel dependen. Uji Kelayakan digunakan untuk menguji variable dalam penelitian. Adapun prosedur pengujian yang digunakan adalah nilai sig uji F > 0.05 maka model regresi tidak layak digunakan, jika nilai sig < 0.05 maka model regresi layak digunakan.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah Uji t yaitu untuk mengetahui signifikan tidaknya masing-masing variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat secara parsial dan yang dominan digunakan uji hipotesis parsial (uji t). Formulasi Hipotesis $H_0; \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, Yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen $H_1; \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, Yang artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel dependen terhadap variabel independent. Adapun kriteria pengujian secara parsial dengan tingkatan *level of significant* a 5% yaitu jika nilai uji $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, jika nilai uji $t < 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Deskripsi statistik digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang telah terkumpul yang terdiri atas 4 Variabel yaitu Penerapan Standar akuntansi pemerintah berbasis Akrua (X1), Pengukuran Kinerja (X2), Sistem pengendalian Internal (X3), dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan (Y). Analisis ini melibatkan jumlah penelitian, nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi.

Tabel 2
Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistic

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akruaal	30	3	5	4,12	0,61
Pengukuran Kinerja	30	3	5	4,32	0,56
Sistem Pengendalian Internal	30	3	5	4,40	0,53
Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah	30	2	5	4,35	0,58

Sumber Data: Output SPSS 2024

Berdasarkan tabel 2 hasil perhitungan menggunakan skala likert dapat diketahui bahwa n atau jumlah data pada setiap variabel yaitu 30. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akruaal memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 5, rata-rata 4,12 dan standar deviasi 0,61. Variabel Pengukuran kinerja memiliki total nilai minimum 3, nilai maksimum 5, rata-rata 4,32 dan standar deviasi 0,56. Variabel Sistem Pengendalian Internal total nilai yang didapatkan dari responden yaitu untuk nilai minimum 3, nilai maksimum 5, rata-rata 4,40 dan standar deviasi 0,53. Variabel terikat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah memiliki nilai minimum 2 nilai maksimum 5, rata-rata 4,35 dan standar deviasi 0,58. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai mean memiliki nilai yang lebih besar dari nilai standar deviasi, sehingga mengindikasikan hal yang cukup baik di sebabkan oleh standar deviasi merupakan pemaparan rendah atau tingginya penyimpangan data.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas dalam penelitian ini, aplikasi SPSS versi 20 digunakan dengan menggunakan metode pengujian *Pearson Product Moment*. Sebanyak 30 responden menjadi sampel penelitian, dengan nilai r tabel 0,3061 dan tingkat signifikansi 5%. Pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner dianggap valid jika nilai r hitung melebihi nilai r tabel.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	R Hitung (Pearson Correlation)	R Tabel N (df) 30. Sig. 0,05	Keterangan
Penerapan SAP Akruaal	X1.1	0,983**	0,3061	Valid
	X1.2	0,912**	0,3061	Valid
	X1.3	0,964**	0,3061	Valid
	X1.4	0,921**	0,3061	Valid
	X1.5	0,894**	0,3061	Valid
	X1.6	0,717**	0,3061	Valid
	X1.7	0,953**	0,3061	Valid
	X1.8	0,983**	0,3061	Valid
	X1.9	0,974**	0,3061	Valid
	X1.10	0,902**	0,3061	Valid
	X1.11	0,974**	0,3061	Valid
	X1.12	0,956**	0,3061	Valid
	X1.13	0,912**	0,3061	Valid
	X1.14	0,952**	0,3061	Valid
	X1.15	0,934**	0,3061	Valid
	X1.16	0,931**	0,3061	Valid
	X1.17	0,931**	0,3061	Valid

Variabel	Item Pernyataan	R Hitung (Pearson Correlation)	R Tabel N (df) 30. Sig. 0,05	Keterangan
Pengukuran Kinerja	X1.18	0,850**	0,3061	Valid
	X2.1	0,774**	0,3061	Valid
	X2.2	0,732**	0,3061	Valid
	X2.3	0,709**	0,3061	Valid
	X2.4	0,706**	0,3061	Valid
	X2.5	0,601**	0,3061	Valid
	X2.6	0,612**	0,3061	Valid
	X2.7	0,622**	0,3061	Valid
	X2.8	0,693**	0,3061	Valid
	X2.9	0,601**	0,3061	Valid
	X2.10	0,739**	0,3061	Valid
	X2.11	0,671**	0,3061	Valid
X2.12	0,680**	0,3061	Valid	
Sistem Pengendalian Internal	X3.1	0,882**	0,3061	Valid
	X3.2	0,698**	0,3061	Valid
	X3.3	0,826**	0,3061	Valid
	X3.4	0,894**	0,3061	Valid
	X3.5	0,874**	0,3061	Valid
	X3.6	0,730**	0,3061	Valid
	X3.7	0,894**	0,3061	Valid
	X3.8	0,791**	0,3061	Valid
	X3.9	0,759**	0,3061	Valid
	X3.10	0,727**	0,3061	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah	Y.1	0,856**	0,3061	Valid
	Y.2	0,731**	0,3061	Valid
	Y.3	0,823**	0,3061	Valid
	Y.4	0,753**	0,3061	Valid
	Y.5	0,845**	0,3061	Valid
	Y.6	0,854**	0,3061	Valid
	Y.7	0,928**	0,3061	Valid
	Y.8	0,678**	0,3061	Valid
	Y.9	0,846**	0,3061	Valid
	Y.10	0,858**	0,3061	Valid
	Y.11	0,893**	0,3061	Valid
	Y.12	0,823**	0,3061	Valid
	Y.13	0,841**	0,3061	Valid

Sumber: Output SPSS 2024

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan kuesioner pada variabel Penerapan Standar akuntansi pemerintah berbasis Akrua, Pengukuran Kinerja, Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa r hitung yang lebih besar dari r tabel (0,3061) sehingga dapat disimpulkan seluruh item pernyataan dan pertanyaan variabel dinyatakan valid dan data yang di kumpulkan dapat memberikan hasil yang baik.

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

	Reliability Statistic	
	Cronbach's Alpha	N of items
Penerapan SAP Akrua (X1)	0,990	18
Pengukuran Kinerja (X2)	0,892	12
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0,939	10
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,958	13

Sumber: Output SPSS 2024

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach alpha* > 0,60 Pada tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0,60 variabel Penerapan SAP Berbasis Akrua (x1) memiliki nilai *Cronbach Alpha* 0,990, variabel Pengukuran Kinerja (x2) 0,892, Sistem Pengendalian Internal (x3) 0,939 dan untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y) 0,958 dapat disimpulkan setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten, sehingga apabila pernyataan ini diajukan kembali maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan item pernyataan dalam kuesioner adalah reliabel.

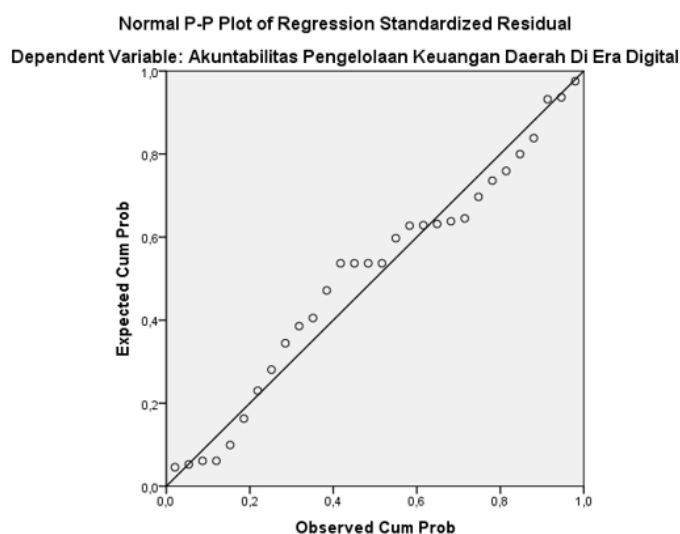
Uji Asumsi Klasik

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas

	SAP Akrua	Pengukuran Kinerja	Sistem Pengendalian Internal	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
N	30	30	30	30
Normal Parameters ^{a b}	Mean	74,20	51,93	44,07
	Std. Deviation	10,394	4,631	4,291
Most Extreme Differences	Absolute	,217	,202	,175
	Positive	,217	,202	,140
	Negative	-,176	-,100	-,175
Kolmogorov Smirnov Z	1,189	1,107	,958	,995
Asymp Sig (2-tailed)	,118	,172	,318	,275

Sumber: Output SPSS 2024

Berdasarkan tabel 5 Hasil uji normalitas dari pengolahan SPSS hasil yang di dapat berdasarkan *One Sample Kolmegrov-Smirnov Test*, semua nilai signifikansi adalah lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.



Gambar 1
Hasil Uji Normalitas menggunakan Normal P-P Plot Regresi
Sumber: Output SPSS 2024

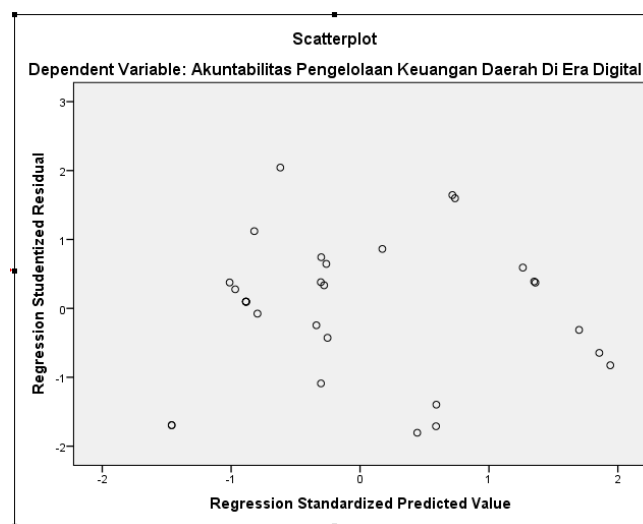
Berdasarkan gambar 1 Memperllihatkan penyebaran data yang berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (X1)	0,729	1,371
Pengukuran Kinerja (X2)	0,920	1,087
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0,782	1,279

Sumber: Output SPSS 2024

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa nilai *Tolerance* untuk variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua x1 Pengukuran Kinerja x2 dan Sistem Pengendalian Internal x3 masing-masing lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk ketiga variabel independen yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua (x1) dengan nilai 1,371, Pengukuran Kinerja (x2) dengan nilai VIF 1,087, dan Sistem Pengendalian Internal (x3) dengan nilai 1,279 lebih kecil dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat problem multikolinieritas dan dapat digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 2
Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber: Output SPSS 2024

Berdasarkan gambar 2 Grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua, Konsep Pengukuran Kinerja, dan Sistem Pengendalian Internal.

Uji Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan empat variabel yang terdiri atas tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Untuk mengetahui pola hubungan antar variabel, maka akan diuji tiga hipotesis yang telah diajukan sebelumnya menggunakan metode analisis regresi linear berganda.

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan persamaan regresi $AP = \alpha + \beta_1.SA + \beta_2.PK + \beta_3.PI + e$ Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan dalam sebagai berikut.

H_1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

H_2 : Pengukuran Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

H_3 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandarized Coefficient		Standarized Coefficient	t	Sig.	
	B	Std.Error	Beta			
1	(Constant)	-10,111	7,925		-1,276	,213
	SAP Akrual	,234	,062	,395	3,774	0,001
	Pengukuran Kinerja	,265	,124	,200	2,143	0,042
	Sistem Pengendalian Internal	,808	,145	,564	5,578	0,000

Sumber: Output SPSS 2024

Berdasarkan tabel 7 Hasil uji regresi linear berganda dapat di analisis model estimasi sebagai berikut.

$$AP = -10,111 + 0,234 (SA) + 0,265 (PK) + 0,808 (PI)$$

Koefisien Konstanta tersebut sebesar -10,111 dengan nilai negatif. Variabel Penerapan SAP berbasis Akrual (SA) memiliki nilai signifikansi 0,001 dan koefisien regresi positif menunjukkan bahwa Penerapan SAP berbasis Akrual berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Variabel Pengukuran Kinerja (PK) nilai signifikansi 0,042 dan koefisien regresi positif menunjukkan bahwa Pengukuran Kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Variabel Sistem Pengendalian Internal (PI) nilai signifikansi 0,000 koefisien regresi positif menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Koefisien Determinasi R²

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase kontribusi variable Penerapan SAP Akrual, Pengukuran Kinerja, Sistem Pengendalian Internal secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pengujian dilakukan tampak pada tabel 8.

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the estimate
1	,890	,792	,768	2,958

Sumber: Output SPSS 2024

Pedoman memberikan interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiyono, (2015) yaitu:

0,00 - 0,199 = sangat rendah

0,20 - 0,399 = rendah

0,40 - 0,599 = sedang

0,60 - 0,799 = kuat

0,80 - 1,000 = sangat kuat

Hasil pengujian diketahui R square sebesar 0,792 yang menunjukkan sumbangan atau kontribusi dari variable Penerapan SAP Akruaal, Pengukuran Kinerja, Sistem Pengendalian Internal secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur sebesar 79,2%. Sedangkan sisanya dikontribusi oleh faktor lainnya.

Uji F

Uji Kelayakan digunakan untuk menguji variable dalam penelitian. Adapun prosedur pengujian yang digunakan adalah nilai sig uji F > 0.05 maka model regresi tidak layak digunakan, jika nilai sig < 0.05 maka model regresi layak digunakan.

Tabel 9
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	867,908	3	289,303	33,069	.000 ^b
	Residual	227,459	26	8,748		
	Total	1095,367	29			

Sumber: Output SPSS 2024

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat dari nilai sig hitung adalah 0,000 yaitu < 0,05 Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh Penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akruaal (x1), Pengukuran Kinerja (x2), Sistem pengendalian Internal (x3) terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan di Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

Uji t

Uji ini digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variable independent secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap variable dependen pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, sedangkan jika nilai probability t lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak (Ghazali, 2016).

Tabel 10
Hasil Uji t

Model	Unstandarized Coefficient		Standarized Coefficient	t	Sig.
	B	Std.Error	Beta		
1	(Constant)	-10,111	7,925		
	SAP Akrua	,234	,062	,395	3,774
	Pengukuran Kinerja	,265	,124	,200	2,143
	Sistem Pengendalian Internal	,808	,145	,564	5,578

Sumber: Output SPSS 2024

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 10, variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,001. Nilai sig 0,001 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua (x1) menerima hipotesis 1 dan menolak hipotesis 0 yang berarti Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 10 variabel Pengukuran Kinerja memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,042. Nilai sig 0,042 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel x2 Pengukuran Kinerja menerima Hipotesis 2 dan menolak hipotesis 0 sehingga dapat diartikan bahwa Pengukuran Kinerja memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah.

Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel 10 variabel Sistem pengendalian Internal memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem pengendalian Internal menerima hipotesis 3 dan menolak hipotesis 0 dan dapat diartikan bahwa Sistem pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin efektif Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrua, semakin meningkatkan tingkat akuntabilitas. Penggunaan sistem SAP Akrua dalam penyusunan laporan keuangan memberikan informasi yang lebih komprehensif dan relevan, sehingga dapat memperkuat Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan prinsip pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya. 2) Pengukuran Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa semakin efektif penerapan Pengukuran Kinerja dalam setiap aspek pengelolaan keuangan, semakin tinggi tingkat Akuntabilitasnya. Ini menunjukkan bahwa Pengukuran Kinerja berperan dalam meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam era di mana akses informasi sangat mudah. Hal ini diharapkan dapat mengarah pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dengan fokus pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. 3) Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Melalui rancangan struktur yang terorganisir, sistem pengendalian internal memberikan keyakinan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan dalam organisasi sesuai

dengan standar kebijakan yang telah ditetapkan. Ketika Pengendalian Internal beroperasi secara efektif dan efisien, pengaruh positifnya akan terasa secara optimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka penulis dapat memberikan saran – saran sebagai berikut: 1) Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat mempertahankan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Implementasi SAP Akrua yang efektif bertujuan agar informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan menjadi komprehensif, informatif, dapat diandalkan, dan relevan. 2) Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam setiap program, kegiatan, dan pengelolaan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap aset daerah yang dikelola. Hal ini bertujuan agar sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal. 3) Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur diharapkan terus meningkatkan sistem pengendalian internal yang memadai, sehingga pembagian tugas menjadi lebih efisien dan efektif, dan risiko kecurangan dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggadini, S.D. 2012. Pengaruh Value For Money Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi*. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester II Tahun 2022. <https://www.bpk.go.id/ihips>. 16 Juni 2024.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Peneliti Universitas Diponegoro. Semarang
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Donaldson, L., dan Davis, J. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholders Returns. *Australian Journal of Management*, 16, 49-64.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Akrua*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Internal (SPI)*.
- Rita, M., Naufal, L., Sukmini, H., Zulkifli, Z., dan Endah, W. 2019. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*. Politeknik Negeri Sriwijaya. Palembang
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Yani, A. 2020. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Konsep Value for Money, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Digital Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Makassar.